

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil, masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menjelaskan tentang penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Asas ini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan asas otonomi daerah, pemerintah harus mempunyai sumber dana untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Salah satu sumber dana untuk kepentingan pemerintahan adalah melalui sektor pendapatan asli daerah. Seperti yang diatur dalam undang- undang No 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. seperti pajak parkir sebesar 20% yang ditetapkan pemerintah daerah .

Penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak parkir yang terdapat di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana kota ini mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan kota- kota lain yang ada di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota pariwisata, kota budaya, dan juga sering disebut sebagai kota Pendidikan, termasuk kota pusat kegiatan bisnis bagi kota dan daerah di sekitarnya. Sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekitar khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berkunjung ke kota ini baik untuk sekedar berlibur, berekreasi, menimba ilmu ataupun juga untuk melakukan bisnis atau belanja.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan transportasi maka tidak dapat dipungkiri minat dan antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke kota Yogyakarta juga semakin meningkat. Hal tersebut kemudian akan menyebabkan terjadinya peningkatan perjalanan dan peningkatan arus lalu lintas dalam kota ini. Tuntutan kebutuhan akan jasa transportasi tentunya juga semakin meningkat, baik itu dari segi sarana dan prasarananya maupun dari segi pelayanan, keamanan,

kenyamanan dan efisiensi perjalanan itu sendiri bagi para pengunjung terutama untuk sarana lahan parkir.

Melihat dari tingkat minat kunjungan masyarakat datang ke Yogyakarta dari tahun ke tahun yang terus meningkat maka Dari segi Pendapatan Asli Daerah pajak parkir merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai dengan subjek dan objeknya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya pajak parkir kota Yogyakarta bagaimana kontribusi dan efektifitasnya terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta pada tahun 2014-2017. Penelitian dilakukan pada salah satu dinas pemerintah daerah kota Yogyakarta yaitu badan pengelola kekayaan asset daerah ( BPKAD ) kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2014-2017?
2. Bagaimana efektivitas pajak parkir Kota Yogyakarta tahun 2014-2017?
3. Apa hambatan pemerintah daerah kota Yogyakarta dalam proses penerimaan pajak parkir tahun 2014-2017?

### **C. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan di badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah kontribusi dan efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta tahun 2014–2017 di kota Yogyakarta dan hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta dalam proses penerimaan pajak parkir.
3. Teori kontribusi dan efektivitas diukur menggunakan klasifikasi kriteria menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2014-2017.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pajak parkir Kota Yogyakarta selama tahun 2014-2017.
3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hambatan penerimaan pajak parkir kota Yogyakarta selama tahun 2014–2017.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan konsep Pajak Parkir sebagai salah satu Pajak daerah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah selain penerimaan yang didapat dari pusat. Manfaat berikutnya adalah menjelaskan kontribusi dan efektivitas dari Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Mengembangkan teori yang didapat mengenai Pajak parkir , sehingga penulis mengetahui bagaimana cara menghitung kontribusi dan efektivitas dari Pajak parkir.

#### **b. Bagi pemerintahan Kota Yogyakarta**

Pemerintah dapat melihat potensi dari sektor pajak dan menggali pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

#### **c. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang teori dari para ahli sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis dan pembahasan.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.